



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5/ORT.07/1906/2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 1/ORT.07/1906/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 4/ORT.07/1906/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 1/ORT.07/1906/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris

Aguseik



RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur Tim terdiri dari: 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); 3) Tim Agen Perubahan 4) Tim Asesor	SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	✓															
				1. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	1. Kegiatan kick off / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur		✓													
				2. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	2. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur		✓													
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal									✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				2. Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi Unit/Satuan Kerja di website resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur										✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Pemberian reward pegawai teladan minimal satu kali dalam setahun											✓					
				2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Penyelenggaraan integritas di lingkungan kerja: 1) Penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu; 2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun; 3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan 4) Pembangunan Zona Integritas	1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN		✓														
				2. Persentase (%) pelaporan LHKPN		✓	✓	✓												
				3. Persentase (%) pelaporan LHKASN		✓	✓	✓												
4. Dokumen laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi: a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan b. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan c. Deklarasi pencahangan Zona Integritas Unit Kerja/Satuan Kerja																		✓		

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur								✓	✓	✓	✓	✓	✓			
				2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Pembangunan instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	1. Tersedianya instrumen <i>reward and punishment</i> di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur									✓							✓
			3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan								✓							✓
					2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan unit)	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja									✓					
		3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada: 1) Tim pengarah di lingkungan Unit 2) Tim Reformasi Birokrasi KPU 3) Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sample		2. Terisnya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit									✓							✓
				1. Tim RB KPU RI menerima pelaporan: a. SK Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor; b. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan unit kerja/satuan kerja c. Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit); d. Terisnya LKE Unit di aplikasi PMPRB Online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sampel																
				2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya															✓	
		2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	Adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur		Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di Revisi							✓	✓	✓	✓	✓	✓							
		3. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah disahkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		4. Pengelolaan JDH	1. Pembangunan JDH Satuan Kerja	1. Dapat diaksesnya JDH Satuan Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
			2. Pengelolaan JDH Satuan Kerja	2. Updaternya data JDH Satuan Kerja	2. Updaternya data JDH Satuan Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3.	Penataan Organisasi/Kelembagaan	1. Evaluasi Organisasi	1. FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	1. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi							✓						✓						
			2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	2. Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI									✓						✓				
		2. Penyesuaian SOTK	1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat	1. SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat	1. SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit/satuan kerja	2. Struktur Organisasi unit/satuan kerja		2. Struktur Organisasi unit/satuan kerja	✓																			
4.	Penataan Tata Laksana	1. Peningkatan tata laksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis									✓	✓									
				2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi											✓	✓							
				3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi												✓	✓						
				4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja												✓	✓						
		2. Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi																✓	✓			
				3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP																		
		2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP																					
		3. SOP sudah dilegalikan																					
		4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan																					
		4. Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti																				
2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur:			1. Adanya kebijakan pendukung P/D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	1. Penyampaian Kebijakan/ Maklum Layanan/ Standar Pelayanan/SOP P/D di lingkungan satuan kerja	2. Dapat diaksesnya Maklum Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja	3. Meningkatnya kepuasan layanan PID									✓				✓	
			3. Pengelolaan PPID dan ePPID di lingkungan satuan kerja	4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID	5. Jumlah sengketa Informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Survei kepuasan pemohon informasi	6. Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID											✓	✓		
				7. Indeks kepuasan pemohon informasi												✓		
		3. Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	1. Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur:	1. Kebijakan Internal tata kelola SPBE											✓			
				2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)	2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)											✓		
				1) Pembangunan aplikasi inovatif/transformatasi Proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di unit/satuan kerja lain	3. Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP											✓		
				2) Strategi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK	4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur											✓		
				3) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi	5. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur													✓
				4) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, e-budgeting)	6. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan													✓
				2. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan:	1) Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				1) Aplikasi tata naskah dinas	2) Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian	3) Tersinya data aplikasi Manajemen Perencanaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				3) Aplikasi Perencanaan	4) Tersinya data aplikasi Penganggaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4) Aplikasi penganggaran	5) Tersinya data aplikasi Manajemen Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5) Aplikasi Keuangan	6) Tersinya aplikasi manajemen kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			6) Aplikasi Manajemen Kinerja	7) % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			7) Aplikasi Pengadaan	- Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan											✓	✓	✓	
			8) Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik:	- Aplikasi Dokumentasi informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (DIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			a. Layanan pengaduan Publik	- Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan jumlah pelapor/Laporan Pengaduan											✓	✓	✓	
			b. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	- Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta:													✓	
			c. Layanan Whistle Blowing System (WBS)	1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik													✓	
			d. Layanan Kepemiluan	2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi													✓	
			- Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	- Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4. Penerapan sistem kearsipan yang handal	1. Penerapan sistem arsip	1. Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			2. Kerjasama dengan arsip daerah	2. Terjelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			3. Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	3. Terdokumentasinya arsip vital	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				4. Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF Arsiparis																	
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Pembangunan Sistem Merit	1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1. Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai	✓						✓						✓				
				2. Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)	✓						✓								✓		
				3. Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara bejenjang/ Cascading	✓						✓										✓
				4. Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu	✓						✓										✓
				5. Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP	✓						✓										✓
				6. Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment	✓						✓										
			2. Penerapan <i>assessment</i> untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	1. Data Mutasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Data Promosi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Data Peserta Assessment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1. Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Jumlah Pelanggaran tahun ini	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja																	✓
			5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi																					
6. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	2. Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja	Renstra satuan kerja														Renstra sudah disusun dan ditetapkan tahun 2020			
			2. Reviu Renstra Satuan Kerja	Renstra hasil reviu							✓										

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i> .	1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV		✓														
				2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward & Punshmet</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan 3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama 4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Persentase sasaran Kinerja: 1) Jumlah Sasaran Kinerja 2) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				3. Persentase Anggaran yang berhasil difocusing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 1) Jumlah anggaran total 2) Jumlah anggaran yang berhasil difocusing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			5. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			6. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Belitung Timur	% Capaian kinerja unit/satuan kerja			✓					✓				✓				✓
			7. Evaluasi Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja 2. Reviu Lakip unit/satuan kerja			✓					✓				✓				✓
			8. Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja	Pelaporan kinerja unit/satuan kerja tepat waktu	✓	✓														
2. Pengelolaan Akuntabilitas	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin	1. Tersinya aplikasi e-Lapkin 2. Data e-Lapkin unit/satuan kerja termutakhir		✓	✓															
	2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja	1. % Jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan			✓															
		2. Pengelola PPSJ bersertifikat																✓		
3. Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja: 1) JF Analis Pengelola Keuangan APBN 2) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3) JF Perencana	1. % Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	2. % Pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa																			
	3. % Pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencana																			
7. Penguatan Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas di unit/satuan kerja	1. Pencanangan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	Terbentuknya Tim Zona Integritas; Ditan datanganinya Piagam Integritas oleh para pihak dan saksi; dan Masuknya unit kerja/satuan kerja dalam penilaian WBK/WBAM														✓			

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalikan								✓						
			3. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	1. Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas 2. % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas								✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	1. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan Zi 2. % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan Zi 3. Melaporkan pembangunan Zi dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalikan								✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE Zi)	1. Terisinya LKE Zi 2. Terisinya PMPRB Zi bagi unit/satuan Kerja yang ditunjuk													✓	
		2. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur													✓	
			2. Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi	1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur 2. Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur 3. Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur									✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Public Campaign Anti Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal									✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1. Laporan pengendalian gratifikasi 2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan														✓
			3. Pelaksanaan Whistle Blowing System KPU	1. Pembangunan aplikasi Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur 2. Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur 3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik 2. Adanya SOP WBS 3. Adanya Pengelola WBS Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti Laporan pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur									✓	✓	✓	✓	✓
		4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1. Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur								✓					✓	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												NET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	% Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan						✓							
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan						✓						✓	
		3. Peningkatan unit/satuan kerja SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	Adanya tim SPIP pada satuan kerja	✓												
			2. Pelaksanaan SPIP: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		6. Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				3. Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				4. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti												✓	
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat												✓	
		7. Peningkatan integritas individu	1. Penyampaian LHKPR	100% seluruh wajib lapor LHKPR di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	✓	✓	✓										
			2. Penyampaian LHKASN	100% LHKASN di lingkungan KPU Kabupaten Belitang Timur	✓	✓	✓										
		8. Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	1. Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan unit/satuan kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai perpres 16 Tahun 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan pengadaan barang/jasa												✓	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
8.	Pelayanan Publik	1. Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan) Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi: 1) Dasar hukum; 2) Persyaratan layanan; 3) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan; 4) Jangka waktu penyelesaian layanan; 5) Biaya/tarif; 6) Produk layanan; 7) Saran, prasarana dan/atau fasilitas; 8) Kompetensi pelaksana 9) Pengawasan internal; 10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 11) Jumlah pelaksana; 12) Jaminan pelayanan; 13) Jaminan keamanan; 14) Evaluasi kinerja pelaksana; Tools evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NDMOR 17 TAHUN 2017	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur baik kepada internal dan eksternal; 1. Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (resiko dan perbaikan standar pelayanan). 2. Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur 3. Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 4. Jumlah sengketa pelayanan menurun; 5. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu; 6. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai) 7. Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal. Penilaian kinerja.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
					2. Mendorong inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur	1. Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Kesesuaian Persyaratan 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Sarana dan prasarana 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan 3. Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik pada pelayanan ke unit kerja/satuan kerja	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
								1. Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi														✓		
								2. Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.															✓	
					3. Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	Membangun dan menerapkan variabel dan indikator Zona Hijau Pelayanan Publik: 1. Standar Pelayanan: 1) Prasyarat layanan 2) Sistem Mekanisme Prosedur 3) Produk Layanan	1. Tersedianya Standar pelayanan sesuai amanat UU 2. Tersedianya Maklumat Pelayanan 3. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
								1. Adanya sosialisasi inovasi														✓	✓	
								2. Benchmarking dari unit/satker lain terkait hasil inovasi														✓	✓	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4) Jangka waktu penyelesaian 5) Biaya/tarif 2. Maklumat pelayanan 3. Sistem informasi pelayanan publik 4. Sarana prasarana dan fasilitas 5. Pelayanan Khusus kepada: 1) Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jakor kursi roda, toilet khusus, dll) 2) Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus 6. Pengelolaan Pengaduan 1) Ketersediaan sarana pengaduan 2) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan; 3) Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan; 7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan 8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan; 1) Ketersediaan visi dan misi pelayanan 2) Ketersediaan moto pelayanan 9. Atribut Pelayanan: 1) berupa kartu identitas petugas; 2) Kartu tamu; 3) Buku tamu; 4) Petunjuk arah ruang layanan 10. Pelayanan terpadu satu pintu	4. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak 5. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan 6. Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan 7. Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya 8. Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan 9. 9. Atribut layanan dapat terlihat publik 10. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1. Pembangunan Kerja Sama 2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan			✓			✓			✓				✓	

Manggar, 17 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

Rizal

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

